

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R. (2012). Institutional Isomorphism dalam Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik di Indonesia. *Ebnews Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Edisi, 13*, 32-34.
- CNNIndonesia. (2019). BPK : BUMDes Belum Berkontribusi Penuh pada Ekonomi Desa
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*: Sage publications.
- Dixon, R., Ritchie, J., & Siwale, J. (2006). Microfinance: Accountability from the Grassroots. *Accounting, Auditing & Accountability Journal, 19*, 405-427. doi: 10.1108/09513570610670352
- Dwidiyantini, K. A., Sulindawati, N. L. G. E., & Edy Sujana, S. (2017). Penyusunan Laporan Keuangan Manufaktur pada badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Tugu Sari Pajahan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 7*(1).
- Ghartey, J. B. (1987). *Crisis accountability and development in the third world: the case of Africa*: Gower Pub Co.
- Gray, A., & Jenkins, B. (1993). Codes of accountability in the new public sector. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*.
- Gray, R., Owen, D., & Adams, C. (1996). *Accounting & accountability: changes and challenges in corporate social and environmental reporting*: Prentice Hall.
- Gunawan, D. R. (2016). Penerapan Sistem E-Budgeting Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya). *AKRUAL: Jurnal Akuntansi, 8*(1), 72-102.
- Handoko, H. (2003). *Manajemen, Edisi Keenam*. Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.
- Harahap, S. S. (2005). *Teori Akuntansi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics, 3*(4), 305-360. doi: [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kholmi, M. (2010). Akuntabilitas dalam perspektif teori agensi. *Journal of Innovation in Business and Economics, 2*(02).
- Kisnawati, B., Astini, Y., & Oktaviani, R. N. (2018). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar. *VALID Jurnal Ilmiah, 15*(1), 1-10.
- Lintong, J., Limpeleh, E., & Sungkowo, B. (2020). Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP pada BUMDes “Kineauan” Desa Wawona Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan, 16*, 95-101. doi: 10.31940/jbk.v16i1.1597

- Mahmudah, S. (2019). Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus: BUMDes Desa Sungon Legowo Bungah Gresik). *Ecopreneur. 12: Journal Economic and Business, 1(2)*, 32-36.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Moleong, L. J. M. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-35 Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nafidah, L., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas, 10*. doi: 10.15408/akt.v10i2.5936
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2010). *Akuntansi Sektor Publik, Edisi Kedua*. Penerbit: Salemba Empat.
- Nugrahaningsih, P., Falikhatun, F., & Winarna, J. (2016). Optimaslisasi Dana Desa Dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) Menuju Desa Mandiri. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 16*, 37. doi: 10.20961/jab.v16i1.190
- Pratiwi, A. A., Sondakh, J. J., & Kalangi, L. (2014). Analisis penerapan SAK ETAP pada penyajian laporan keuangan PT. Nichindo Manado Suisan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 2(3)*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Desa (Perdes Nomor 03 tahun 2015) tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Desa (Perdes Nomor 188 tahun 2018) tentang pembentukan BUMDes Mandiri Sejahtera Kampunganyar susunan penasehat dan pengurus pelaksana operasional di desa Kampunganyar kecamatan Glagah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Purnomo. (2016). *Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Yogyakarta: Infest.
- Riyanto, T. (2015). Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *Ejournal Administrasi Negara, 3(1)*, 199-130.
- Salle, I. Z. (2015). Akuntabilitas Manuntungi: Memaknai Nilai Kalambusang pada Lembaga Amil Zakat Kawasan Adat Ammatoa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 6(1)*, 28-37.
- Widiastuti, H., Manuhara Putra, W., Rahman, E., & Suryanto, R. (2019). Menakar tata kelola badan usaha milik desa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 22*, 257-288. doi: 10.24914/jeb.v22i2.2410
- Witono, B. (2002). Akuntansi Sektor Publik dan Akuntabilitas Keuangan Daerah. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 1(1)*, 12-23.

Yango, M. D. (1991). Institutional Mechanism for Promoting Accountability in the Philippines Civil Service. *Asian Review of Public Administration*, 3(2).

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang- Undang Nomor 28 tahun 1999 pasal 7 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme